BAB V

PEMBAHASAN

A. Bitcoin ditinjau dari Pandangan Ulama NU, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung

Pandangan ulama tentang hukum Bitcoin memang sangat diperlukan melihat dari berkembangnya Bitcoin saat ini di Kabupaten Tulungagung dan dilihat dari sektor pengguna Bitcoin tidak hanya dari aliran Nahdlatul Ulama tetapi juga Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sehingga pandangan terkait Bitcoin dari ketiga ormas muslim tersebut sangat di harapkan, karena masih banyak yang menanyakan terkait hukum Bitcoin.

Dari pandangan beberapa ulama NU mengatakan bahwa Bitcoin adalah salah satu bentuk mata uang digital berbasis kripto yang saat ini banyak diminati dikalangan kaum milenial. Namun saat ini Bitcoin tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi tetapi juga sebagai investasi. Para ulama mengatakan bahwa jika bitcoin dijadikan sebagai mata uang, maka menurut dari beberapa ulama NU tidak menyetujuinya, karena melihat dari syarat uang dan kriteria uang belum terpenuhi. Akan tetapi, para ulama NU melihat dari segi fungsinya maka Bitcoin ini sama dengan uang pada umumnya karena kegunaannya sama bisa dijadikan alat tukar atau pembayaran.

Sama halnya yang disampaikan dari ulama Muhammadiyah mengatakan bahwa Bitcoin adalah sebuah mata uang digital yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok. Kemudian ulama Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai mata uang karena tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai uang.

Kemudian pandangan ulama dari LDII juga mengatakan bahwa Bitcoin tidak bisa dijadikan mata uang karena sifatnya global yang tidak bisa dimiliki oleh negara manapun. Kemudian ulama LDII juga mengatakan bahwa Bitcoin sampai saat ini belum ada regulasi atau *underlying* dan tidak ada otoritas yang mengatur. Sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai mata uang harus adanya *underlying*.

Dari pandangan ulama dari ketiga ormas muslim di Tulungagung terkait Bitcoin yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini, jadi setelah dijelaskan dari para tokoh agama di atas, kemudian dianalisis penulis yaitu mengenai Bitcoin diantaranya sebagai berikut:

Mata uang dapat juga disebut juga alat tukar, pada zaman dahulu alat tukar yaitu berupa dinar dan dirham yang bahanya terbuat dari emas tembaga dan lain-lain. Dengan seiring berkembangnya zaman, mata uang diganti dengan uang kertas karena memberikan kemudahan dan lebih efektif. Dalam berjalannya waktu, uang kertas juga mengalami perubahan nilai dan fluktuasi harga (standar harga) seperti contoh kita bisa menukar

uang kertas dengan 1 gram emas seharga Rp. 50.000 tetapi pada zaman sekarang Rp. 500.000.

Mata uang kertas mata uang yang diakui oleh negara, maka jika ada fluktuasi harga dari nilainya tersebut maka diperbolehkan digunakan sebagai alat transaksi walaupun terdapat perbedaan zaman dahulu dan sekarang. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang bisa digunakan sebagai alat tukar maupun investasi dan dari banyaknya mata uang kripto yang paling banak digunakan adalah Bitcoin.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital. Kemunculan mata uang Bitcoin pertama kali pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto yang menggunakan nama samaran. Bitcoin dalam Islam sebagai mata uang hukumnya diperbolehkan sah-sah saja selama tidak ada mudharat dan tidak merugikan umat sebagaimana pengertian uang.

و على الوسيط ذلك كان مهما عاما قبولاً يلقي للتبادل وسيط كل هو النقد يكون حال أيّ

“Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi apa pun”

Dalam hadis dari Ubadah bin Sahmit ra. Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai.

Jika benda yang dibarterkan beerbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.”(HR.Muslim)¹⁶¹

Dari hadis di atas mayoritas ulama menafsirkan bahwa para ulama telah menyepakati bahwa emas dan perak diberlakukan hukum riba karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai interinsik bendanya melainkan kegunaannya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta, akan tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah. Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain emas dan perak. Bisa saja ada orang yang menyembelih unta hanya untuk diambil kulitnya sementara dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan andai bukan kebijakan masalah kelestarian unta, akan diterbitkan mata uang berbahan kulit unta.

Dari hadis di atas menjadi dasar para ulama bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak. Imam Malik pernah mengatakan:

“Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai.”

Dengan demikian kedudukan Bitcoin sebagai alat tukar menurut hukum Islam adalah boleh, tetapi dengan syarat harus ada serah terima

¹⁶¹ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih para Mujtahid, jilid 3, terj.*, Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 3-4

(*taqabudh*) dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda, disyaratkan harus taqabudh secara hakiki atau hukmi: “ada uang ada *cryptocurrency* seperti bitcoin bisa diserahterimakan”.

Sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di Indonesia mata uang yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Dengan adanya resiko yang timbul dari penggunaan Bitcoin, maka pengguna atau komoditas tersebut bertanggungjawab secara individu atau kepada komunitas itu sendiri dalam menghadapi resiko-resiko yang terjadi. Dikatakan sebagai mata uang yang sah terdapat dalam pengaturan hukum terkait uang sebagai alat pembayaran, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 1 ayat 1 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah serta dipertegas dalam Pasal 2 UU Mata Uang memuat bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah dan Indonesia mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku di wilayahnya. Dengan adanya peraturan tersebut maka mata uang Bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai mata uang yang sah di Indonesia.

Berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran di suatu negara, bahwa penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam. Karena dalam suatu penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal

yang mana berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan dalam penerbitan uang tidak boleh bermain-main karena berdampak terjadinya madharat yang besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya.¹⁶²

Di antara dari bentuk kemadharatannya adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turun nilainya (inflasi), juga kerugian terhadap orang-orang yang memiliki *income* akibat hal tersebut. Karena itu, para fuqaha berpendapat bahwa dalam penerbitan uang itu sudah menjadi otoritas suatu negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan sendiri, apalagi sampai melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan uang maka akan menimbulkan dampak yang berakibat sampai merusak.

Imam Ahmad mengatakan “*Tidak boleh menerbitkan uang melainkan dipercetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, jika masyarakat laus diperbolehkan menerbitkan uang, maka akan melakukan bahaya yang besar*”.¹⁶³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah al-jauziah berkata, “*Seyogyanya pemerintah mencetak uang untuk mereka (rakyat) sebagai nilai pengganti dalam muamalat mereka*”.¹⁶⁴

¹⁶² Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, ter., Asmuni Solihan Zamakhsari, Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amri Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab, (Jakarta: Khalifa, 2003), hal. 339

¹⁶³ Al-Qadhi Abu Ya’la Muhammad bin Husen al-Farra’, *Al-Ahkam AsSulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H), hal. 181

¹⁶⁴ Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ al-Fatawa*, (Madinah: Majma’ Al-Malik Al –Fahdi li Thiba’ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H), hal. 469

Jika melihat pandangan kedua ulama di atas bahwasannya dalam pembuatan uang yang sah untuk alat transaksi masyarakat harus sesuai ketentuan pemerintah dan tidak boleh menerbitkan uang diluar percetakan negara. Sehingga dalam hal ini bitcoin termasuk alat transaksi yang tidak berbentuk fisik seperti halnya di Indonesia yang berbentuk uang kertas.

Secara prinsip, pengertian mata uang sebagai alat tukar tidak masalah selagi tidak adanya tindak penipuan, tidak merugikan dan spekulasi. Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah memang belum memperbolehkan Bitcoin dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah karena masih banyak masyarakat yang belum menerimanya dan masih banyak negara-negara yang menolak Bitcoin.

Temuan baru seperti Bitcoin memang patut diapresiasi sebagai kemajuan teknologi dibidang ekonomi, selain itu perpindahan seperti mata uang dalam bentuk lama kepada mata uang digital tidak adanya permasalahan, akan tetapi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak boleh menggunakannya sebagai alat tukar, karena itu kita wajib mengikuti putusan dari pemerintah. Tidak dianjurkannya menggunakan Bitcoin karena melihat lebih banyaknya kemudharatan, sedangkan kemudharatan itu harus kita jauhi.

B. Penggunaan Bitcoin ditinjau dari pandangan ulama NU, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung

Pandangan hukum Islam penggunaan Bitcoin masih menjadi perdebatan sampai saat ini, kemudian hasil dari penelitian telah mendapatkan beberapa jawaban dari beberapa tokoh ormas muslim di Tulungagung seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang penggunaan Bitcoin sebagai berikut:

1. Pandangan beberapa tokoh ulama NU

Tidak dapat dipungkiri kemunculan Bitcoin sampai saat ini menimbulkan polemik terkait hukum penggunaan Bitcoin. Pandangan mengenai penggunaan Bitcoin para ulama NU melihat dari sisi segi transaksi menggunakan Bitcoin maka diperbolehkan karena dilihat dari kacamata fiqih telah memenuhi syarat dari jual beli dan melihat kegunaan dan fungsinya sama yaitu bisa digunakan sebagai alat transaksi. Meskipun Bitcoin tidak ada wujud atau bentuk fisiknya, akan tetapi keberadaan Bitcoin bisa diterima dimasyarakat umum dan khususnya para pengguna Bitcoin itu sendiri.

Realita yang ada saat ini, penggunaan Bitcoin ditujukan untuk spekulasi yang mana dalam hal ini banyak mengandung gharar atau tidak adanya kepastian. Karena naik turunnya sangat signifikan yang sewaktu-waktu dan ini sangat berbahaya yang menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Sehingga para ulama NU memberikan penjelasan bahwa hukum Bitcoin cenderung haram dengan melihat berbagai pertimbangan terkait penggunaan Bitcoin sebagai investai. Bahkan sampai saat ini belum adanya regulasi yang mengatur tentang Bitcoin,

sehingga bagi para pengguna diharapkan berhati-hati akan resiko yang terjadi. Akan tetapi belum adanya regulasi terkait Bitcoin maka tidak mengurangi keabsahan dari transaksi dengan Bitcoin.

2. Pandangan Bapak Aji Damanuri selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Muhammadiyah di Tulungagung

Penggunaan Bitcoin saat ini tidak digunakan sebagai alat transaksi akan tetapi juga digunakan untuk investai. Beliau menjelaskan penggunaan Bitcoin jika dilihat dari sisi transaksi dengan Bitcoin maka diperbolehkan yang terpenting memenuhi syarat dari jual beli. Akan tetapi, jika Bitcoin digunakan sebagai investasi maka tidak diperbolehkan karena melihat dari nilainya yang fluktuatif dan banyak mengandung gharar dan lebih keperjudian.

Kemudian, beliau juga menjelaskan bahwa Bitcoin itu sama halnya dengan trading forex, karena sama persis dan mengandung spekulasi yang tingkat keghararannya sangat tinggi. Sehingga dilihat dari sisi hukum Islam maka tidak diperbolehkan investasi dengan Bitcoin meskipun sampai saat ini Bitcoin belum adanya regulasi dari pemerintah dan bagi para masyarakat yang belum paham dengan Bitcoin lebih baik jangan coba-coba karena bisa merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

3. Pendangan Bapak H. Priyono selaku Wakil Ketua DPD LDII di Kabupaten Tulungagung

Pandangan beliau mengenai penggunaan Bitcoin sebagai investasi maka tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar dan maisyir, karena resiko yang terjadi itu sangat besar. Jika dibuat alat transaksipun beliau tidak memperbolehkan karena tidak jelas barang apa yang diperjualbelikan didalamnya dan jika terjadi resiko maka tidak ada yang bertanggung jawab.

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dalam Islam transaksi harus adanya saling ridho dan akadnya harus jelas, barangnya pun harus jelas. Sedangkan dalam Bitcoin tidak ada bentuk fisiknya sehingga kedudukannya sebagai alat transaksipun tidak jelas. Beliau juga mengatakan bahwa dalam Islam semua transaksi itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jika dikaitkan dengan Bitcoin maka sangat jelas perbedaannya karena Bitcoin mengandung unsur gharar yang sangat tinggi sehingga dalam hal ini Bitcoin tidak bisa dijadikan sebagai alat transaksi.

Dari beberapa pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa investasi menggunakan Bitcoin hukumnya haram tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar. Dari sini penulis menganalisis hasil dari investasi dengan Bitcoin sebagai berikut:

Pertama, landasan Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹⁶⁵

Bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 90 dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti syariatNya, sesungguhnya khamr yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal dan maysir yang didalam praktiknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingatkan Allah dan anshab yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan disisinya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya dan semua ditegakkan untuk dibadahi demi mendekatkan diri kepadanya dan azlam yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka dengannya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya semua itu termasuk perbuatan dosa dan tipu daya setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan dengan memperoleh surga.¹⁶⁶

Dari ayat di atas yang berkaitan dengan investasi Bitcoin adalah maysir. *Maysir* secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapat laba tanpa bekerja untuknya.¹⁶⁷ Dalam Islam

¹⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah, surah Al-Maidah ayat 90, cet 6*, (Bandung: CV Penerbit Diponorogo, 2010), hal. 123

¹⁶⁶ Hikmat Baysr, dkk, *Tafsir Musayyar, Cet.1*, (Jakarta: Darul Haq,2016) hal. 361

¹⁶⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana 2012), hal. 59

maysir yang digunakan disini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi taruhan atau permainan yang beresiko.¹⁶⁸

Maysir merupakan sebuah permainan, apabila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu dan pada hakikatnya maysir termasuk gharar karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gamebling.¹⁶⁹

Kedua, Landasan Hadis

حدثنا أبو كريب, أنبأنا أبو أسامة, عن عبد الله بن عمر, أبي الزناد, عن الأعرج, عن أبي هريرة, قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصة.

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Huarairah ra, berkata : “Rasulullah melarang jual beli *gharar dan hashat*”.¹⁷⁰

Ia berkata pada permasalahan ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'ad dan Anas. Abu berkata status hadis Abu Hurairah ini adalah hasan shahih para ulama mengamalkan hadis ini yaitu memakruhkan jual beli gharar. As-syafi'i berpendapat diantara jualbeli adalah menjual ikan dalam air, menjual budak yang sudah lari, menjual burung di angkasa dan semisalnya.

¹⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. Ke-1* (Jakarta, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 1054

¹⁶⁹ Adiwarmanto Abdul Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011), hal. 43

¹⁷⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Sari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta Pustakaazzam, 2014), hal. 18

Gharar mempunyai pengertian yaitu resiko peluang bertaruh atau resiko. Gharar ditemukan jika adanya kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak yang bersifat tidak pasti atau tidak jelas dalam pengiriman salah satu item yang tidak diperdagangkan dan tidak dikontrol oleh pihak manapun atau penyebaran salah satu pihak yang tidak pasti. Jual beli dikatakan gharar berarti tidak ada yang diketahui, atau adanya bahaya tertentu. Seperti menjual ikan yang masih di dalam air, buah hingga kelihatan buahnya, menjual hewan yang masih dalam kandungan. Transaksi gharar dapat timbul karena ada dua sebab utama, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak (akad) dan kedua, karena tidak adanya obyek.¹⁷¹

Ketidakpastian tidak dapat dihindari seluruhnya dalam suatu bisnis apapun. Pengembalian resiko merupakan sebuah kondisi untuk hak mendapatkan laba dalam bisnis. Masalahnya dalam sedikit banyaknya ketidakpastian yang membuat sebuah transaksi menjadi haram karena belum jelas dan terdefinisikan.¹⁷² Dengan demikian transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar atau tidak pasti dan mengandung maysir atau perjudian tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Sama halnya seperti Bitcoin yang mengandung unsur gharar dan maysir.

Ketiga, Landasan Ijtihad Qiyas

¹⁷¹ Vethrizal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*,(Jakarta : Bumi Aksara ,2012), hal. 18

¹⁷² *Ibid.*, hal. 19

Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Menurut bahasa kata ijtihad berasal dari bahasa arab yang artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, secara terminologi ijtihad dimana untuk melakukan ijtihad seseorang di syaratkan memiliki kemampuan yang berat.¹⁷³

Salah satu metode ijtihad adalah qiyas. Dikalangan ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam menerapkan qiyas untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi berbeda pendapat dalam lapangan syar'i. Jumhur ulama, memandang qiyas sebagai dalil hukum yang dijadikan salah satu metode istinbath hukum Islam. Terkecuali kelompok al-Nazhzhah, Dawud al-Zhahir, Syi'ah Imamiyah tidak mengakuinya qiyas sebagai metode istinbath hukum.¹⁷⁴

Jumhur ulama menjadikan qiyas sebagai metode istinbath hukum Islam, adalah sebagai pengamalan terhadap teks Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan apabila ditemui suatu peristiwa atau kasus yang tidak didapat hukumnya dalam kitab Allah dan sunnah Rasul Muhammad Saw., agar merujuk (dikembalikan) kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu penggunaan qiyas dalam istinbath hukum merupakan bagian yang esensial dalam pembahasan ilmu ushul fiqh.

¹⁷³ Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Intimedia Cipta Nusantara), hal. 53

¹⁷⁴ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al Fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilmi ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 199-200.

Bitcoin sebagai instrument investasi di qiyaskan seperti menjual ikan yang masih dalam air, keduanya sama-sama memiliki persamaan yaitu gharar atau mengandung ketidakjelasan. Dengan demikian penggunaan Bitcoin dalam investasi hukumnya tidak diperbolehkan dan sangat membahayakan orang lain terutama diri sendiri.

Keempat, Ijtihad maslahah al-Mursalah

Metode ijtihad yang kedua yaitu digunakan sebagai istinbath hukum seputar investasi Bitcoin adalah *Maslahah al-Mursalah* arti kata *maslahah* adalah mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan atau menolak kemelaratan. Karena mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemelaratan itu tujuan manusia namun yang dimaksud kata *maslahat mursalah* ialah memelihara maksud syara dengan jalan menolak segala yang merusak atas mahluk atau tujuan syara' mereka seperti memelihara jiwa mereka, memelihara akal pikiran mereka, memelihara keturunan mereka dan memelihara harta benda mereka.

Maslahah al-Mursalah adalah yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nashnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan kepada azas menarik manfaat dan menghindari mudharat. Dengan kata lain maslahat mursalah dapat juga diartikan sebagai kemaslahatan umum atau kebaikan untuk bersama dengan tujuan untuk memelihara agama.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Depok: Gema Insani, 2016), hal. 241

Walaupun berinvestasi pada Bitcoin mendapatkan profit yang besar dalam waktu singkat, akan tetapi juga dilihat dari aspek kemudharatannya Bitcoin jika sebagai instrument investasi maka tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar yang ada didalamnya terdapat spekulasi, untung-untungan dan perjudian. Namun itu semua kembali kepada semua pengguna dan pemilik Bitcoin terkait kemadharatan dan maslahatnya.